



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : WAKIL KEPALA LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FRITZ EDWARD SIREGAR
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 411439

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.404.263.456

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/80 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 2.100.000.000
2. Tanah Seluas 3695 m2 di TAPANULI UTARA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 83.98 m2/83.98 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.054.263.456

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 358.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 26.916.894**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 3.814.180.350**III. HUTANG** Rp. 2.127.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.687.180.350**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.